

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MENGURANGI TIMBUNAN SAMPAH DENGAN PRINSIP 3R OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA CIMAHI**

**Andika Dwi Haryadi<sup>1)</sup>, Zaenal Abidin AS<sup>2)</sup>, Harky Ristala<sup>3)</sup>**  
 1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
 Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## **Abstrak**

Masalah sampah semakin meningkat dan kurangnya kesadaran akan bahaya timbunan sampah, yang akan menimbulkan masalah yang lebih serius. Namun dengan adanya penerapan prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber daya. Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Mengurangi Timbunan Sampah dengan Prinsip 3R oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Cimahi”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul melalui hasil wawancara diolah dan digunakan menjadi analisis deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Mengurangi Timbunan Sampah dengan Prinsip 3R oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Cimahi masih belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, terbatasnya sumber daya manusia yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi kepada masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas sehingga kurang terpenuhinya sarana dan prasarana.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 3R.**

## **Abstract**

*The problem of waste is increasing and there is a lack of awareness of the dangers of waste accumulation, which will cause more serious problems. However, the application of the Reduce, Reuse, and Recycle (3R) principle in waste management is*

*considered an effective solution to reduce the amount of waste produced and maximize the reuse of waste as a resource. The study entitled "Implementation of Waste Management Policy in Reducing Waste Piles with the 3R Principle by the Environmental Service in Cimahi City". The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collected through interviews are processed and used to become a qualitative descriptive analysis.*

*The results of this study indicate that the Implementation of Waste Management Policy in Reducing Waste Piles with the 3R Principle by the Environmental Service in Cimahi City is still not running effectively. This is due to the low level of community participation in waste management, limited human resources that affect the effectiveness of socialization to the community, and limited budget and facilities so that facilities and infrastructure are not met.*

**Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Environmental Service, 3R.**

## **PENDAHULUAN**

Sampah merupakan salah satu permasalahan sulit yang dihadapi oleh negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Pratiwi (2018) “bahan padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, akomodasi, hotel, restoran, industri, bahan bangunan, dan besi tua,” adalah sampah yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah segala sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan (Wiryono, 2013). Oleh karena itu, mengendalikan tumpukan sampah sangat penting untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan menyenangkan.

Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan baik untuk lingkungan maupun masyarakat. Dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi, pedoman Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, berfungsi sebagai dasar. Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup. Untuk pengelolaan sampah yang efektif, ada aturan yang jelas, partisipasi publik, dan tanggung jawab pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*reduce, reuse, and recycle*) mengatur sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah

tangga. Pengurangan berarti mengurangi jumlah sampah yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber daya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi.

Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai konsep dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian berikut diantaranya:

1. implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "implementasi" memiliki makna "pelaksanaan" atau "penerapan". Implementasi sering kali dikaitkan dengan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster mendefinisikan "mengimplementasikan" sebagai "menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu" atau "menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu". Oleh karena itu, dalam proses implementasi, penting untuk memiliki sarana yang mendukung agar dapat memberikan efek praktis yang diinginkan (Solichin Abdul Wahab, 2008).

Implementasi memiliki (Christianingsih, 2020) makna yang bervariasi tergantung pada bidang ilmu yang sedang dipelajari. Menurut Mazmanian dan Sebastier dalam Wahab (2012:68), implementasi merujuk pada pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk undang-undang, namun juga dapat berupa perintah, keputusan eksekutif yang signifikan, atau keputusan dari badan peradilan. Menurut George C. Edwards III (Herabudin, 2016), tahapan implementasi terjadi di antara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau efek dari kebijakan tersebut. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, menurut George Edwards III: disposisi, struktur birokrasi, komunikasi, dan sumber daya.

## 2. Kebijakan

Pada prinsipnya, kebijakan adalah suatu peraturan yang harus diikuti sebagai panduan, pegangan, atau pedoman dalam setiap tindakan dan kegiatan pemerintah agar dapat berjalan dengan lancar dan teratur guna mencapai tujuan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan memberikan arahan dalam menjalankan tugas mereka terhadap masyarakat dan menjadi acuan bagi untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan (Christianingsih et al., 2020).

Menurut Lu & Sidortsov, (2019) menyatakan bahwa suatu kebijakan merupakan rangkaian atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerinth untuk tujuan tetentu dalam memecahkan masalah-masalah publik yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat yang membutuhkan tindakan penyelesaian. Adanya Kebijakan yang telah ditetapkan dapat diharapkan mampu mengatasi dan memberikan suatu manfaat atau memberikan suatu harapan pada suatu kondisi yang berdampak baik bagi masyarakat (Hastuti et al., 2021).

## 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dalam ruang lingkup senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementor dan kelompok sasaran adalah nama untuk orang-orang yang bertugas menerapkan kebijakan. Implementor kebijakan adalah individu atau organisasi yang secara resmi ditunjuk untuk mengelola program di lapangan (Maulidyka Agustyan Sudrajat, 2017).

Goerge C Edwards III dalam (Herabudin, 2016) menyatakan bahwa tahapan implementasi merupakan tahapan yang berada antara tahapan penyusunan kebijakan dengan hasil atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Menurut Goerge Edwards III, terdapat empat penyebab yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Masing-masing dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi

satu sama lain secara tidak langsung. Peneliti menguraikan beberapa komponen, yaitu:

- i. Komunikasi  
Berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
- ii. Sumber Daya  
Kemampuan pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan kebijakan secara efisien tidak lepas dari tersedianya sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia.
- iii. Disposisi  
Berkaitan dengan kesiapan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan publik.
- iv. Struktur Birokrasi  
Tentang kesesuaian badan birokrasi yang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pendapat dari para ahli terkait model-model implementasi kebijakan. Maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik menggunakan teori George C. Edward III (dalam Agustino Leo, 2016) yang terdiri dari sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini dikarenakan teori tersebut menyoroti kompleksitas hubungan antara faktor-faktor ini dan betapa pentingnya pengelolaan yang baik dari masing-masing aspek untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik. Serta mampu mengukur keberhasilan dan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mengurangi Timbunan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Cimahi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian kualitatif ialah metode yang dipakai untuk menggambarkan fenomena berdasarkan yang terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. Metode ini menekankan interpretasi makna, konteks, dan kompleksitas dalam data yang diteliti (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

## **PEMBAHASAN**

Pengelolaan sampah yang efektif merupakan pilar penting untuk keberlanjutan lingkungan di Kota Cimahi, yang tengah menghadapi tantangan urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk. Masalah sampah semakin kompleks dengan bertambahnya volume sampah yang dapat merusak ekosistem jika tidak ditangani dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi mengambil langkah strategis melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Kebijakan ini juga bertujuan mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah sehari-hari. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan untuk masa depan.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Mengurangi Timbunan Sampah dengan Prinsip 3R Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Cimahi, maka peneliti menggunakan operasionalisasi konsep implementasi kebijakan menurut Edward III yang diterapkan dalam pemerintahan dengan 4 (empat) komponen 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, 4) struktur

birokrasi. Jawaban dari setiap informan akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yang melibatkan penyampaian informasi berupa ide, gagasan, atau pesan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Proses ini tidak hanya sekadar bertukar kata-kata, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam antara pengirim dan penerima pesan. Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada dua aspek penting dalam dimensi komunikasi. Aspek pertama adalah bagaimana informasi disampaikan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Aspek kedua adalah penerimaan dan pemahaman informasi tersebut oleh para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti secara langsung, terkait dimensi Komunikasi, upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah berjalan cukup baik, dengan menyelaraskan informasi untuk mendukung program yang telah ditetapkan. Dinas berperan penting memastikan informasi kebijakan dan program pengelolaan sampah tersampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Berbagai langkah dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang tepat dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan Kota Cimahi yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Walaupun tantangan dalam menjangkau seluruh masyarakat masih ada, Dinas terus berupaya agar sosialisasi berjalan efektif dan mampu mendorong partisipasi masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.

### 2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya merujuk pada beragam aspek atau faktor yang menggambarkan keberadaan, kualitas, dan potensi dari suatu sumber daya yang ada di suatu wilayah atau organisasi. Dimensi ini tidak hanya terbatas pada satu jenis

sumber daya saja, melainkan mencakup berbagai jenis sumber daya yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum, dimensi sumber daya dapat mencakup sumber daya alam, yang terdiri dari segala bentuk kekayaan alam yang ada di bumi, seperti air, tanah, udara, mineral, dan hutan yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, dimensi sumber daya juga mencakup sumber daya manusia, yang berhubungan dengan tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti secara langsung, terkait Dimensi Sumber Daya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk kelancaran program pengelolaan sampah dan lingkungan, seperti fasilitas daur ulang yang lebih terjangkau dan sarana prasarana pendukung yang memudahkan partisipasi masyarakat. Selain itu, infrastruktur yang tepat juga diperlukan, seperti jalur pengangkutan sampah yang terorganisir, sistem pemilahan sampah yang efisien, dan pemanfaatan teknologi untuk mengelola sampah secara efektif. Dinas melakukan pembinaan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah baik kepada pegawai di dalam dinas maupun di luar dinas, termasuk kepada UPTD.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan salah satu elemen penting yang dapat menggambarkan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Disposisi ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, seperti pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang ada, arah respon terhadap kebijakan tersebut, serta tingkat intensitas dalam melaksanakan kebijakan. Sebuah kebijakan yang baik dan efektif tentu membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, namun juga memerlukan kemampuan praktis untuk melaksanakannya dengan tepat. Oleh karena itu, para



pelaksana kebijakan tidak hanya harus memahami isi dan tujuan kebijakan, tetapi juga memiliki keterampilan, komitmen, dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara optimal.

Berdasarkan wawancara dan observasi langsung, pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam dimensi Disposisi dinilai cukup baik. Dinas melakukan pembinaan mendalam terkait kebijakan melalui pelatihan, sosialisasi, dan diskusi intensif mengenai standar operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti dalam setiap kegiatan operasional. Selain itu, Dinas memberikan sanksi berupa denda atau teguran bagi karyawan yang melanggar aturan, baik dalam lingkup internal maupun kegiatan yang melibatkan pihak luar. Dalam aspek disiplin dan tanggung jawab, Dinas menerapkan langkah tegas dengan memberikan surat peringatan kepada karyawan yang melanggar aturan. Evaluasi rutin juga dilakukan untuk memastikan koordinasi tim berjalan lancar dan program yang diterapkan mencapai hasil optimal.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir dengan baik memainkan peranan yang sangat krusial dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sebuah sistem birokrasi yang efektif memungkinkan jalannya kebijakan dengan cara yang lebih terkoordinasi, efisien, dan terukur. Dalam hal ini, hierarki yang tepat menjadi elemen fundamental, karena hierarki yang jelas membantu menentukan siapa yang bertanggung jawab di setiap level organisasi dan memastikan alur pengambilan keputusan yang tepat. Pembagian tugas yang jelas juga sangat penting, karena setiap individu atau unit dalam birokrasi memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, yang memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang diemban dan bekerja dengan lebih efektif.

Berdasarkan wawancara dan observasi langsung, pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam dimensi Disposisi dengan dinilai cukup baik. Dinas melaksanakan pembinaan mendalam melalui pelatihan, sosialisasi, dan diskusi intensif terkait standar operasional

prosedur (SOP) yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan. Untuk menjaga kedisiplinan, Dinas memberikan sanksi berupa denda, teguran, atau surat peringatan kepada karyawan yang melanggar aturan, baik dalam lingkup internal maupun dalam kegiatan yang melibatkan pihak luar. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan koordinasi tim berjalan baik dan program yang diterapkan mencapai hasil optimal. Selain itu, pembagian wewenang dan tanggung jawab telah diatur dengan jelas melalui SOP, di mana setiap bagian memiliki tugas terperinci sesuai bidangnya, seperti pengelolaan sampah, pengadaan sarana, dan pengawasan. Struktur ini memastikan pelaksanaan kebijakan berlangsung lebih efektif dan efisien, sekaligus mendukung pencapaian tujuan secara optimal.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menghadapi beberapa tantangan, seperti komunikasi informasi yang belum sepenuhnya efektif, terutama bagi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dalam hal peralatan dan anggaran. Meski demikian, disposisi pelaksana kebijakan dinilai cukup baik melalui program pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan, sementara struktur birokrasi telah memiliki pedoman yang jelas untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya efektivitas sosialisasi kepada masyarakat akibat ketidakpedulian dan kesulitan akses informasi, serta keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak agar menjangkau lapisan masyarakat lebih luas. Selain itu, Dinas berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pemanfaatan peralatan dan infrastruktur yang ada secara efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Christianingsih.(2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung.
- Hastuti. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia* , 92-102.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke*

*Implementasi*. Bandung: CV. Pustaka.

Maulidyka, S. A. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KOTA MANADO. *Eksekutif*, 3-4.

Pratiwi. D. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Ilmu Politik dan Ilmu Sosial*, 3-4.

Solichin, W. A. (2008). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. 121-123.

Wiryono. (2013). Pengantar Ilmu Lingkungan. 1-2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle*.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.